



**BPK RI**



# **PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**



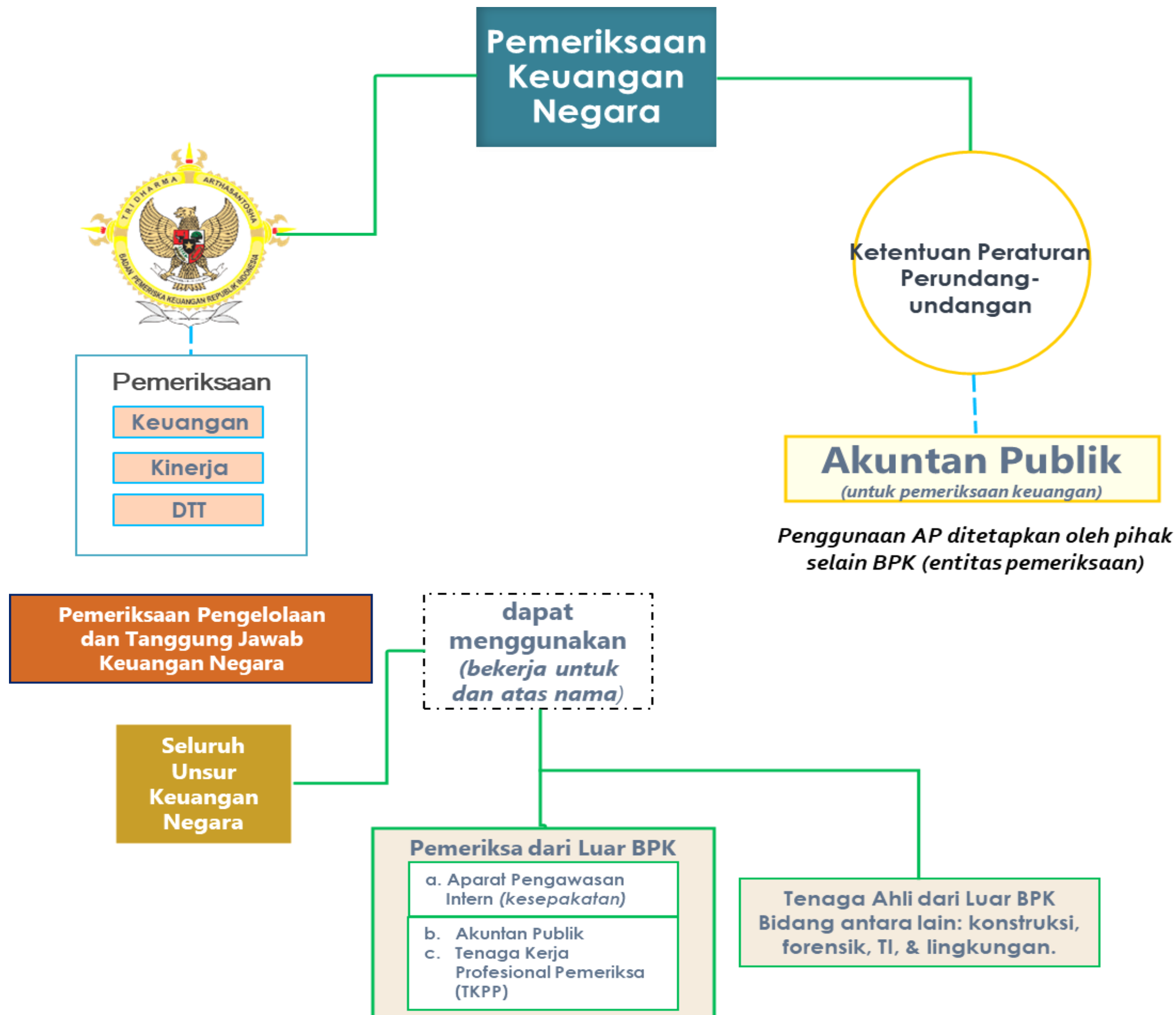
**Laode Nusriadi**

**Auditor Utama Keuangan Negara VI**

**Jakarta, 7 Maret 2024**

## KERANGKA HUKUM

- UUD 1945
- UU 17/2003
- UU 1/2004
- UU 15/2004
- UU 15/2006
- UU Sektoral



Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara  
(UU 15/2004 Pasal 1 butir 1)

# LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

UUD 1945 → TUJUAN NEGARA

RPJPN 2005-2025 → UU No. 17 Tahun 2007

RPJMN 2020-2024 → Perpres No. 18 Tahun 2020

RKP/RKPD TAHUNAN → Perpres No. 108 Tahun 2022 (RKP 2023)

APBN/ APBD TAHUNAN → UU No. 28 Tahun 2022 (APBN 2023)

LKPP/LKPD TAHUNAN → PERTGJWBN ATAS PELAKSANAAN APBN/APBD

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023). Sedangkan pada Pemda masih mengacu pada Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP

UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA

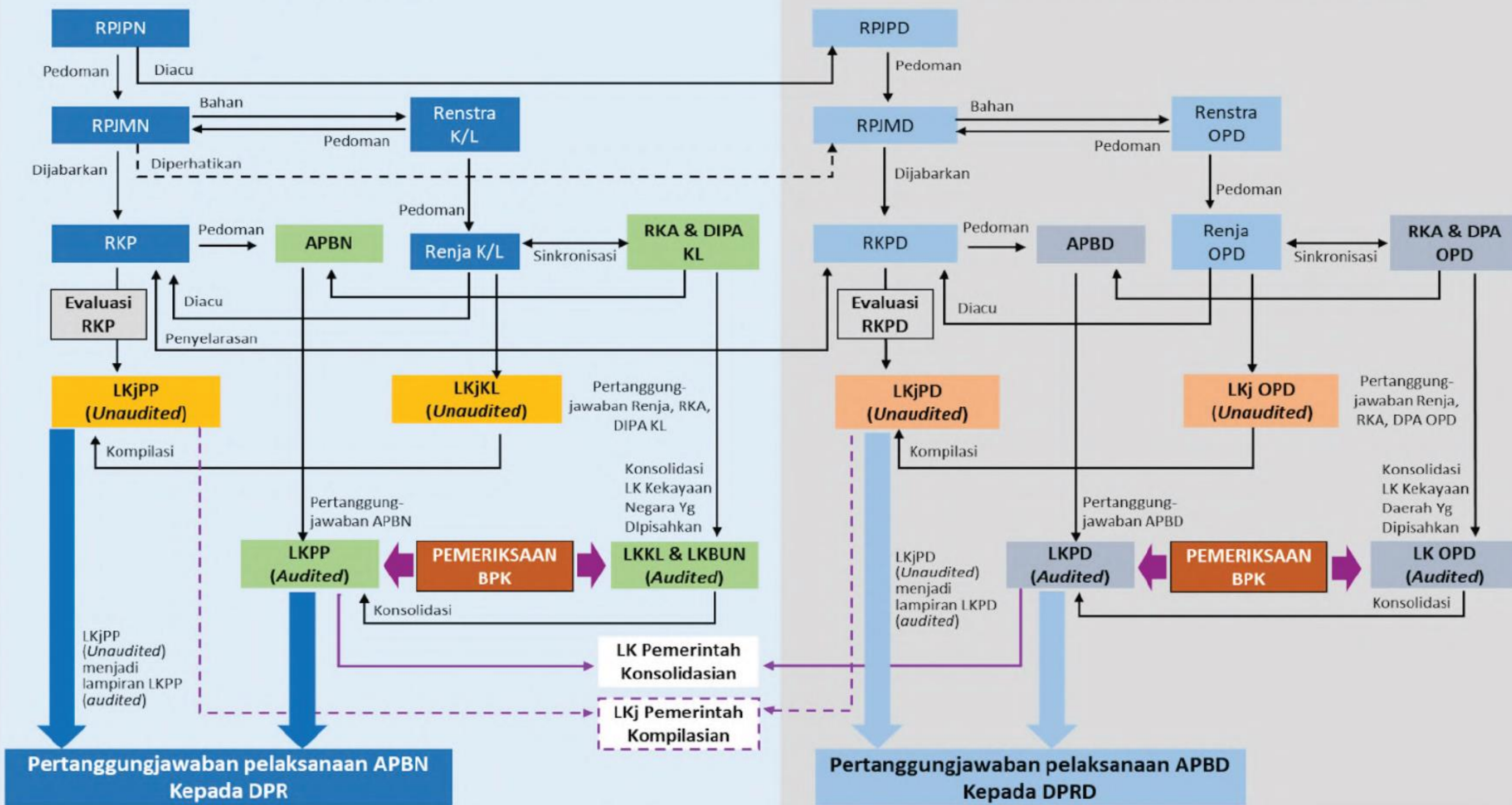
# PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN KEUANGAN & KINERJA PEMERINTAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

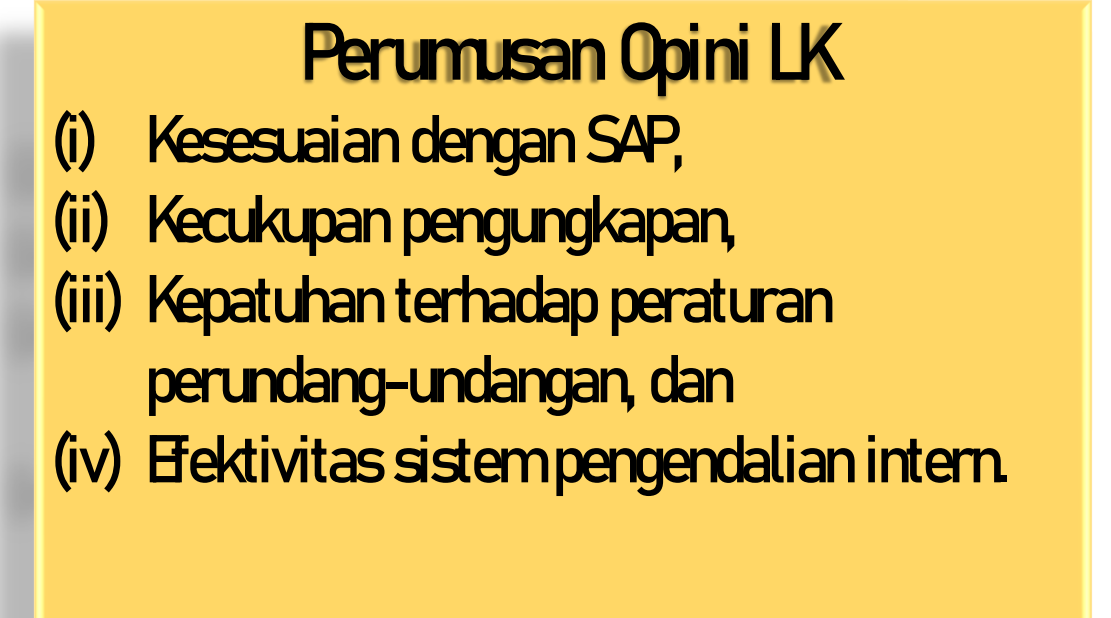
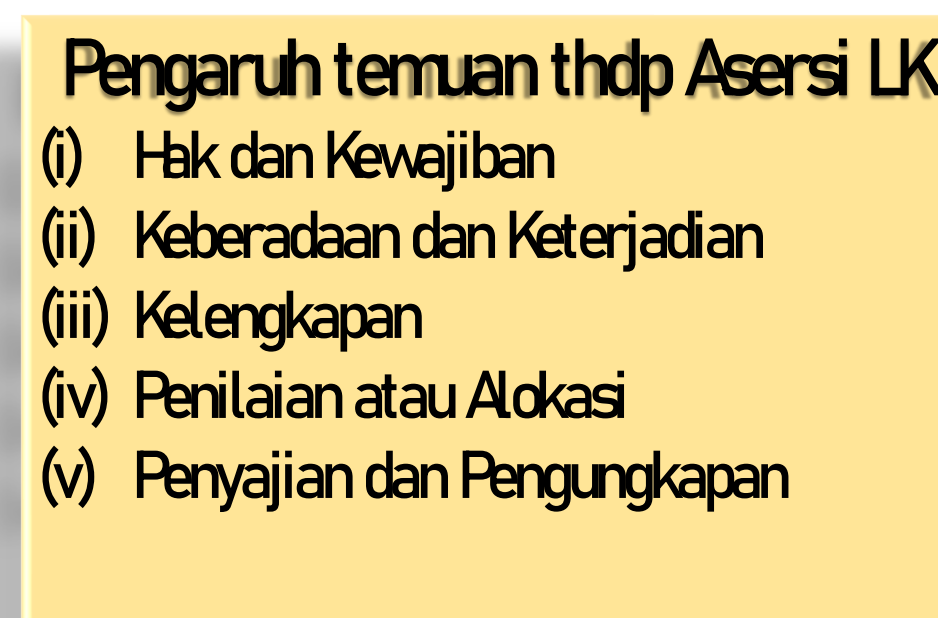
PERTANGGUNGJAWABAN APBN DAN APBD

## Pemerintah Pusat

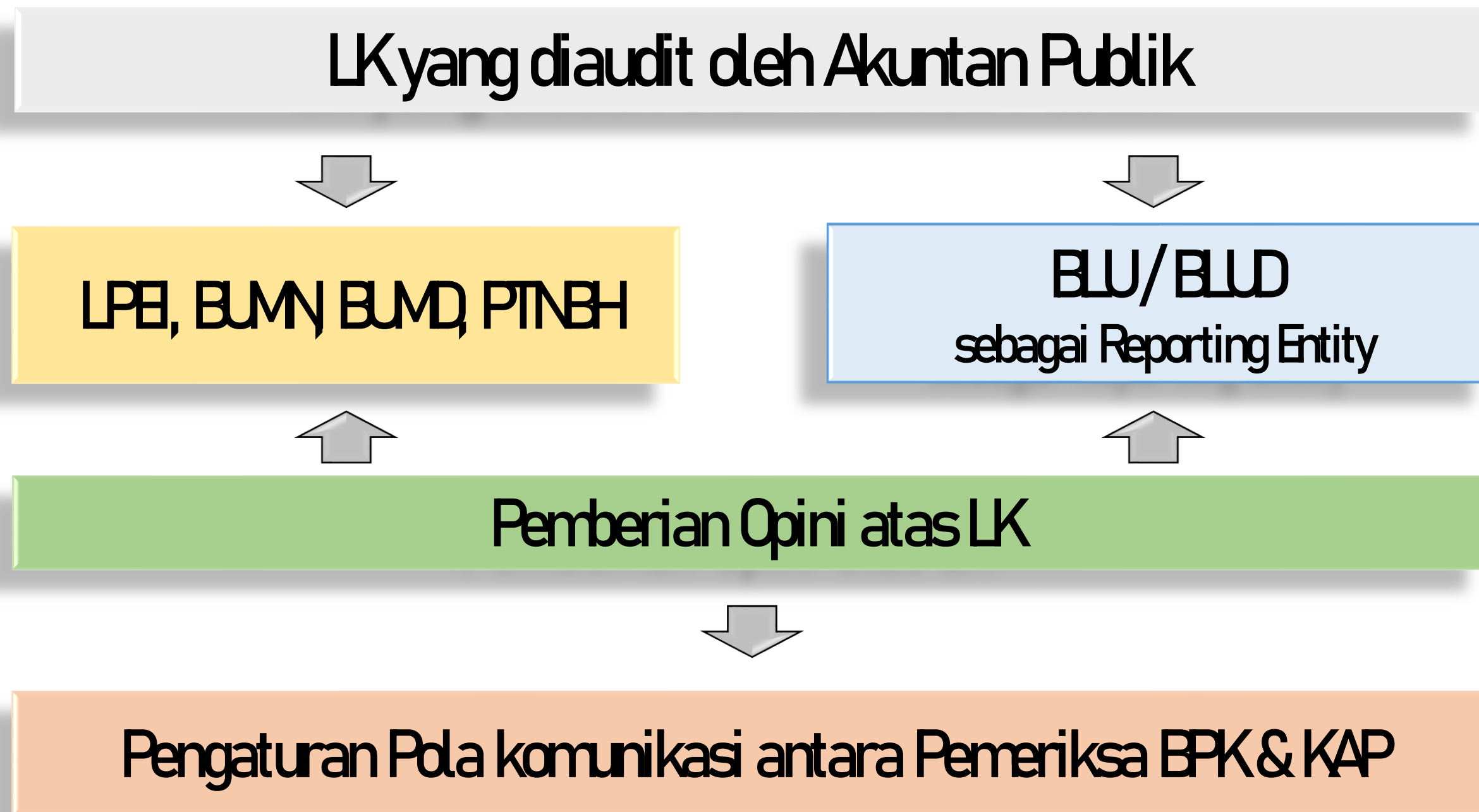
## Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)



# KERANGKA PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH



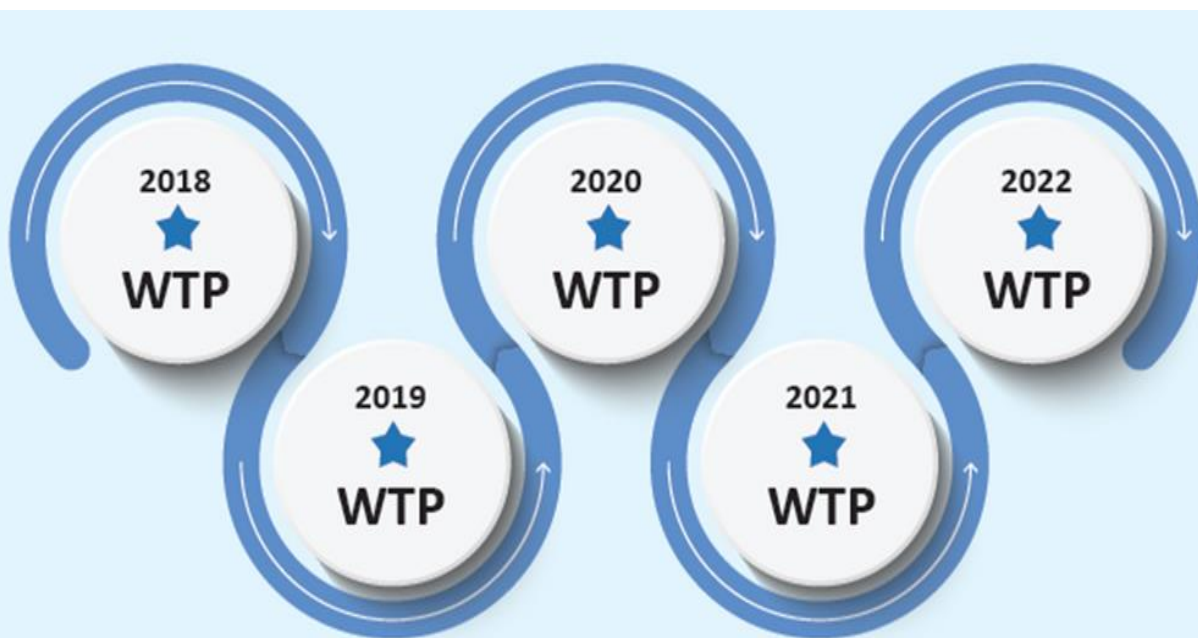
# STRATEGI PEMERIKSAAN ATAS LK ENTITAS TERTENTU



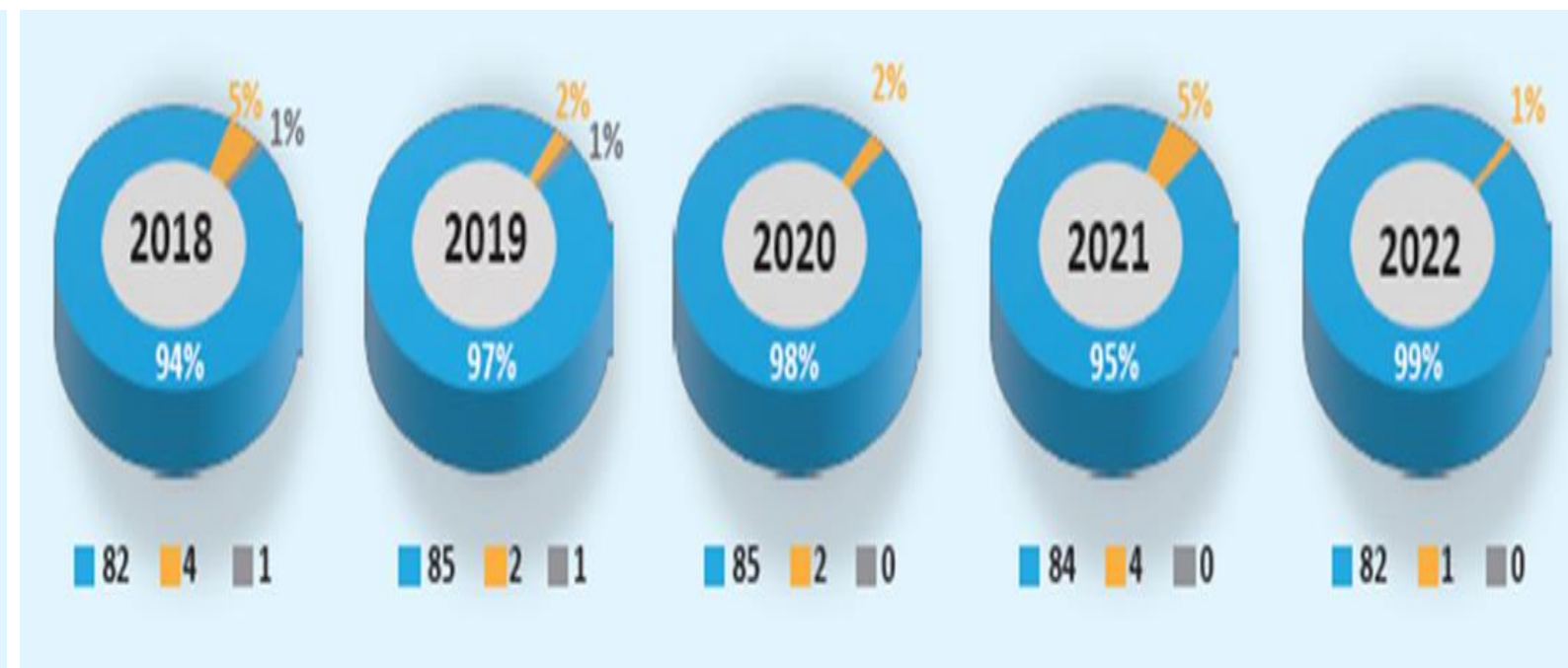
- ❑ Dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam SPAP yang ditetapkan oleh asosiasi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN
- ❑ **Pola komunikasi antara BPK & KAP** dengan menerapkan SPAP SA 600 *Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)*, terkait penggunaan pekerjaan KAP

# HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

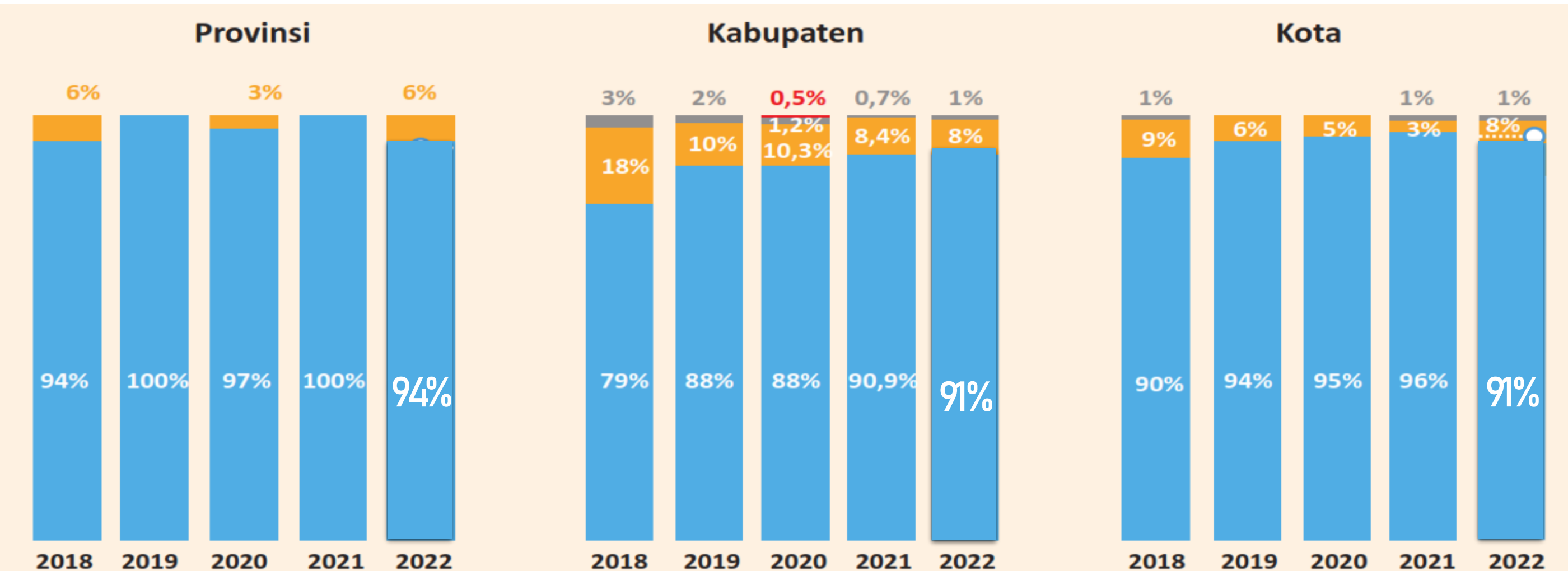
## PERKEMBANGAN OPINI LKPP



## PERKEMBANGAN OPINI LKKL

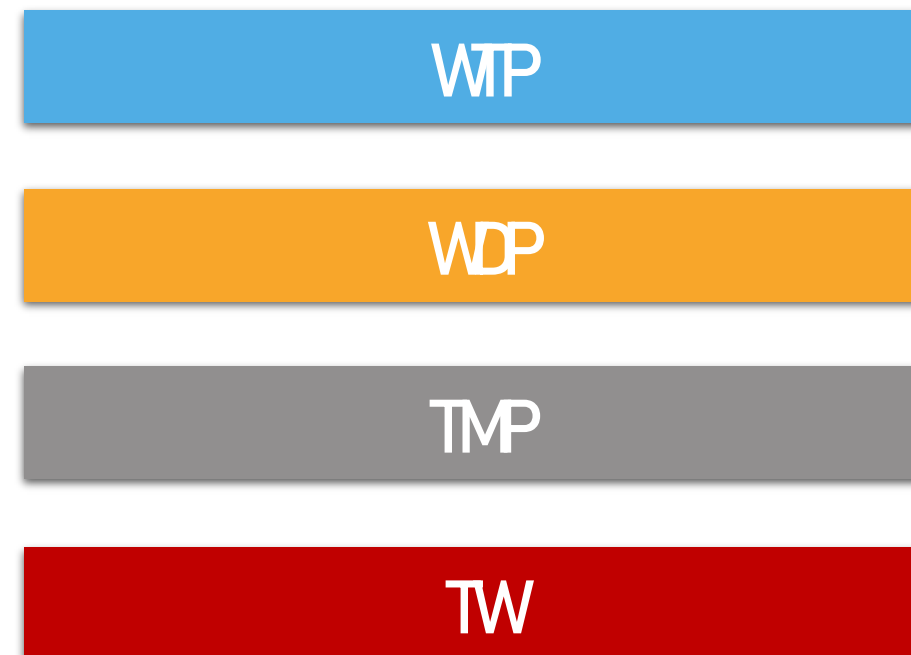


## PERKEMBANGAN OPINI LKPD



↑ Kenaikan Opini dari Tahun 2021  
15 Pemkab

↓ Penurunan Opini dari Tahun 2021  
2 Pemprov 13 Pemkab 4 Pemkot



# TIPOLOGI TEMUAN (BERULANG) DALAM PEMERIKSAAN LK PEMERINTAH

## PERMASALAHAN PENDAPATAN

Pendapatan Telah Memiliki Dasar Hukum Namun:

- terlambat/belum disetor ke kas
- kurang/lebih dipungut
- tidak dipungut
- digunakan langsung

Pungutan Belum Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung

Kesalahan Pencatatan Piutang dan Akun Akun terkait

## PERMASALAHAN BELANJA

Kesalahan Penganggaran (Belanja Barang – Belanja Modal)

Kesalahan Pembayaran (kelebihan / kekurangan volume pekerjaan)

Permasalahan Ketidapatuhan dalam Pelaksanaan Kontrak

Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

Ketidaktengkapan Bukti Pertanggungjawaban Belanja

Proses Pengadaan Barang Tidak Sesuai Ketentuan

Kesalahan Pencatatan Utang dan Akun Akun terkait

## PERMASALAHAN ASET

Persediaan

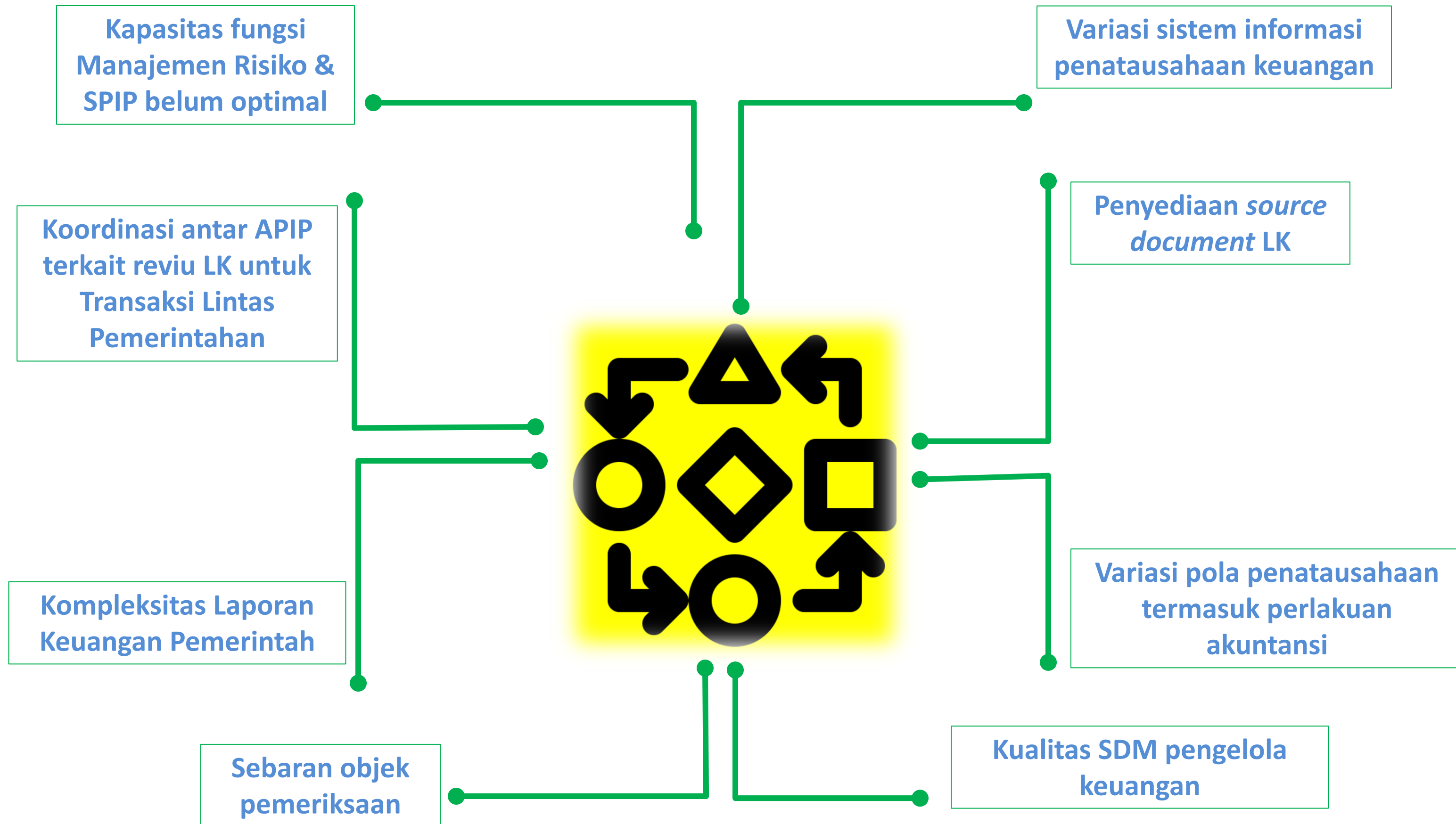
- Nilainya diragukan (tidak dilakukan stock opname)
- Kesalahan pencatatan / telah diserahkan ke pihak lain namun masih tercatat / mutasi tidak dapat ditelusuri
- Telah diserahkan ke pihak lain tapi masih tercatat

Aset tetap

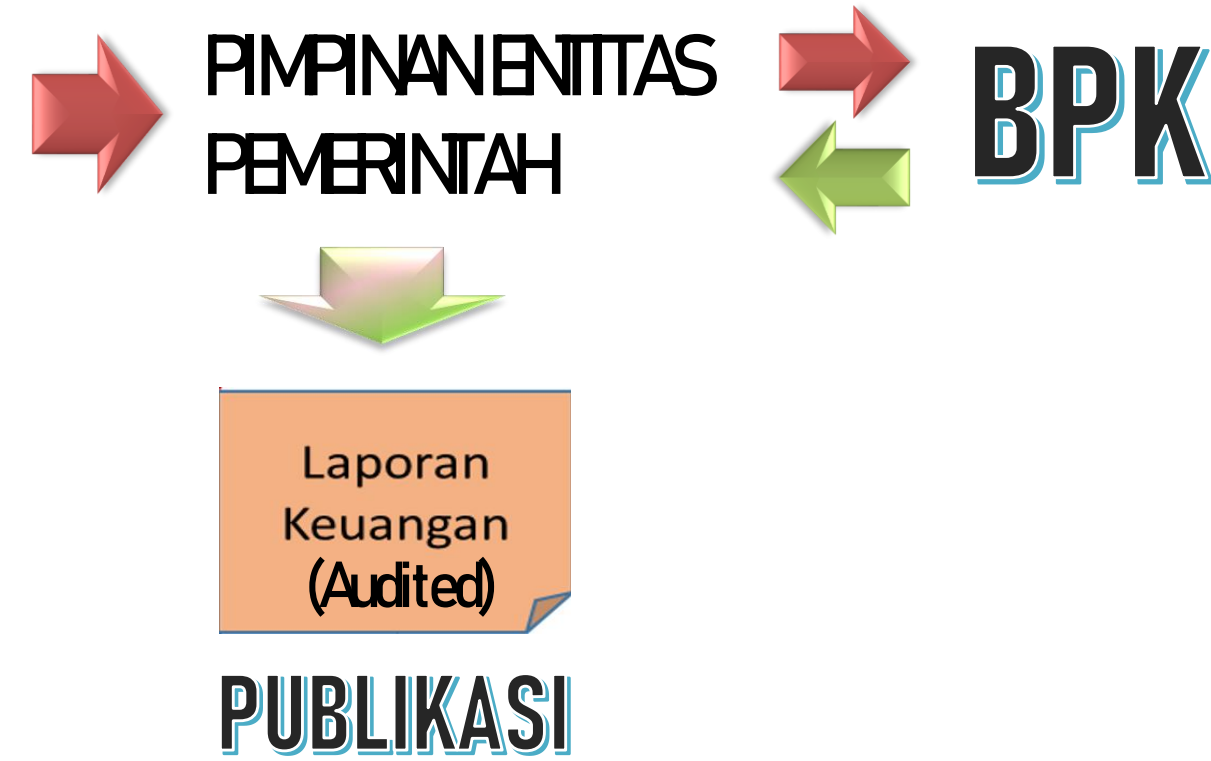
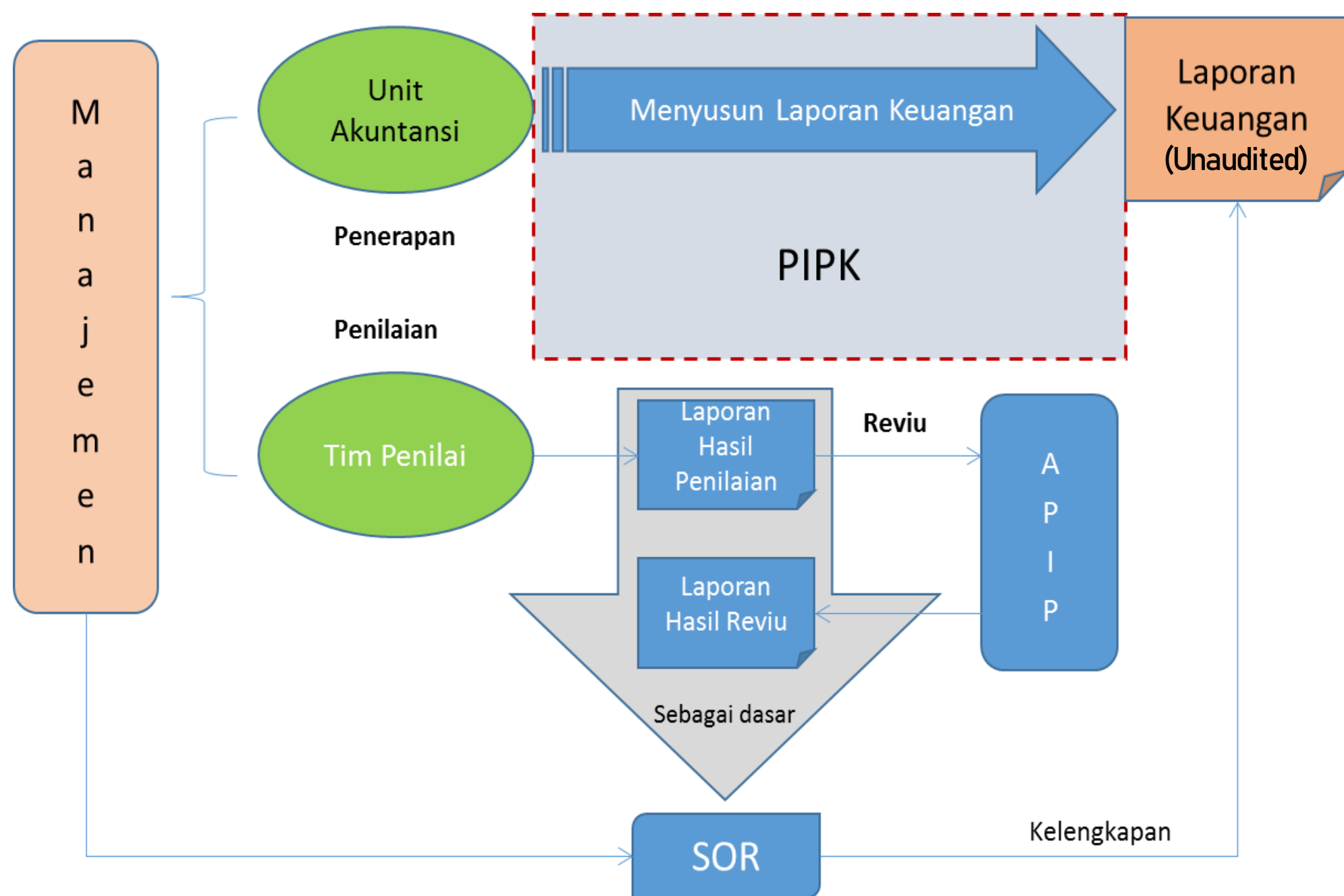
- Kesalahan pencatatan / telah diserahkan ke pihak lain namun masih tercatat / mutasi tidak dapat ditelusuri
- Tidak diketahui keberadaannya
- Belum didukung dengan dokumen kepemilikan
- dikuasai/digunakan pihak lain tidak sesuai ketentuan
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang sejak lama tidak mengalami mutasi
- Rusak berat belum hapus buku
- Hasil pengadaan sejak lama belum dimanfaatkan



# DINAMIKA DALAM PEKERJAAN LAPANGAN PEMERIKSAAN LK



# PERLUNYA PENGUATAN ICoFR DALAM MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH & SPIP



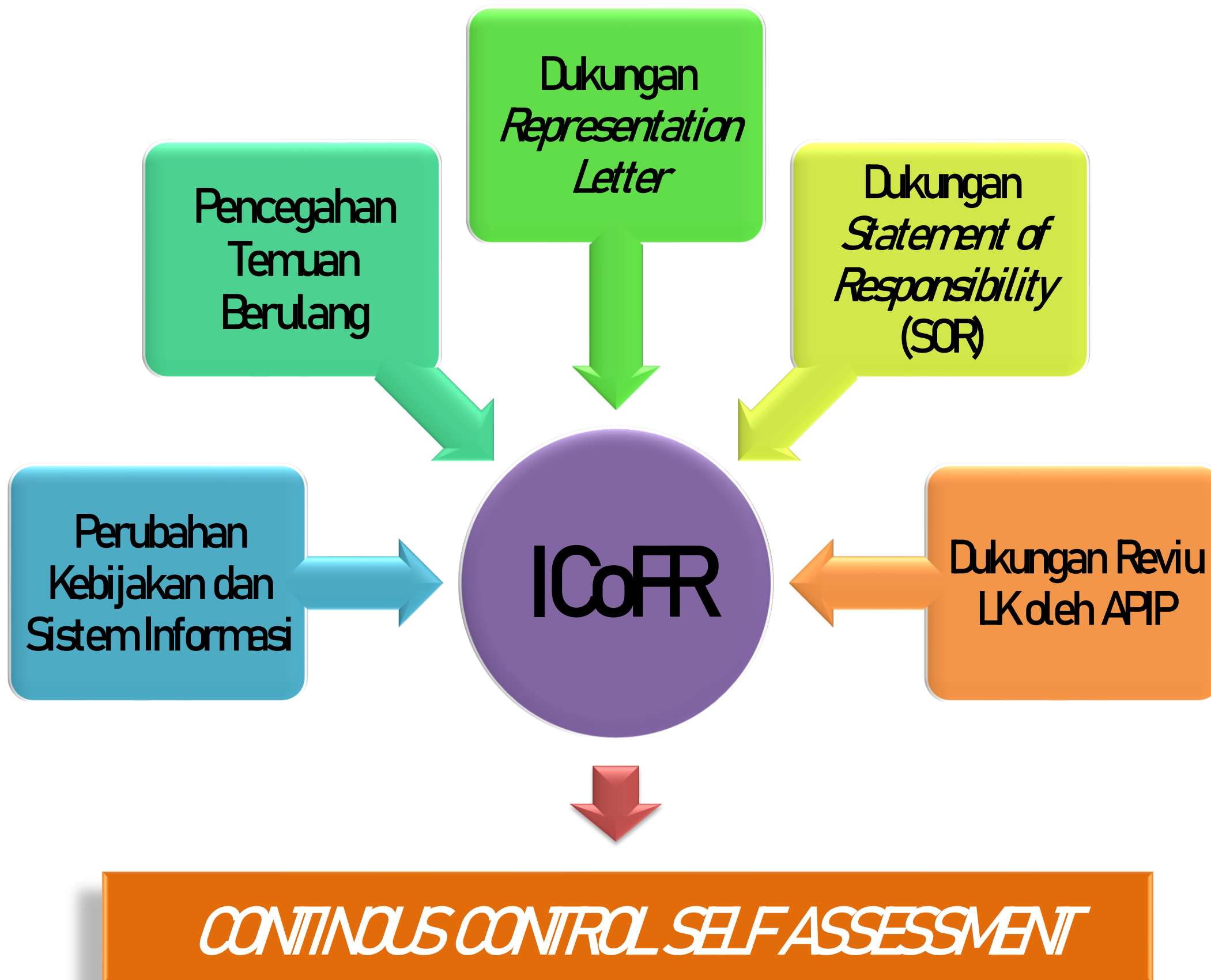
SPAP, SA 260 mensyaratkan eksternal auditor agar berkomunikasi dengan: **“those charge with governance”** (melengkapi SA 580 dan SA 610)

## KONSEP *THE THREE LINES MODEL*

- (PMK No. 14/PMK09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat)
- Permendagri No. 77/2020 bahwa LKPD dilakukan reviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan

Siapa yang ditetapkan di lingkungan pemerintah, sebagai **“those charge with governance”** ?  
Menjadi *The Fourth Line* dalam ICoFR

# MANFAAT ICoFR DALAM MANAJEMEN RISIKO & SPIP

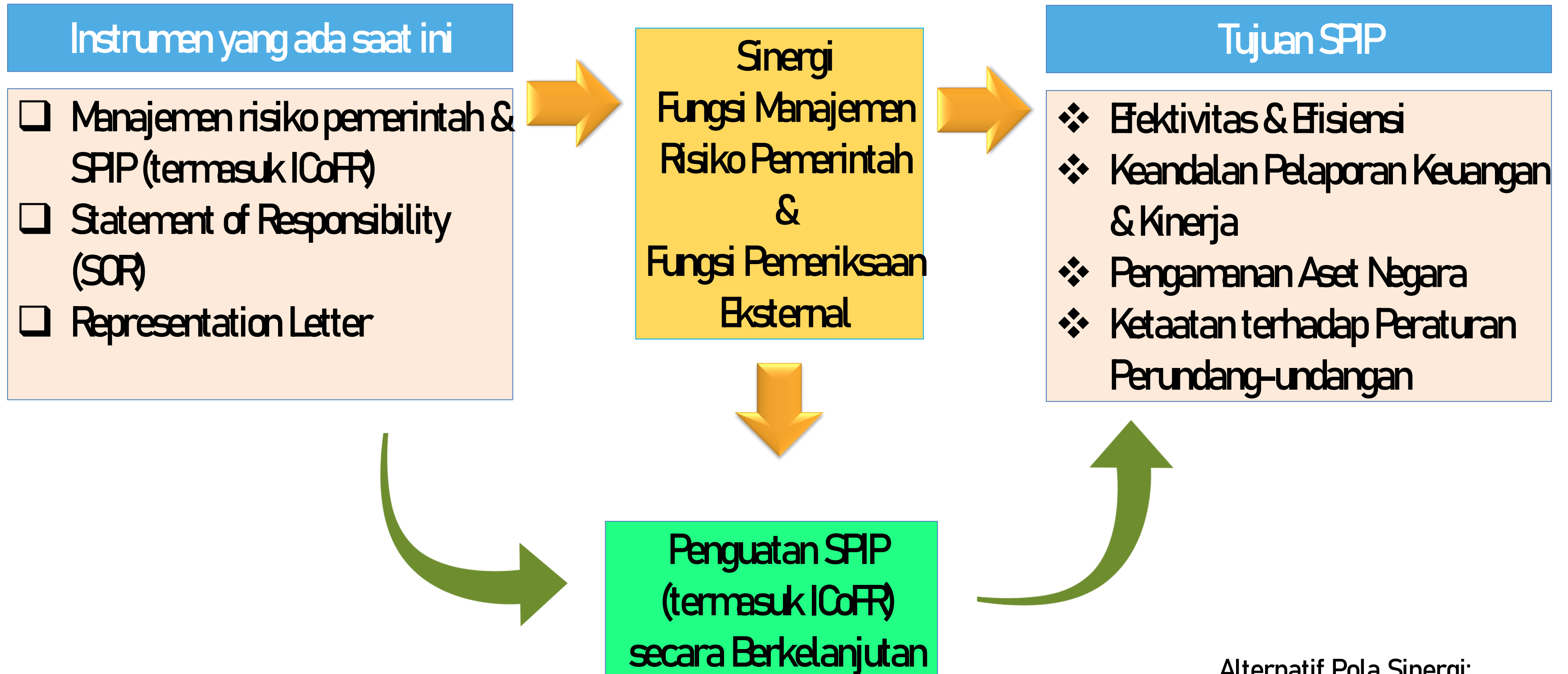


ICoFR → pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan


SOR → pernyataan Menteri/Pimpinan Lembaga/Daerah bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan:

- sistem pengendalian intern yang memadai dan
- akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

# TANTANGAN PENGUATAN MANAJEMEN RISIKO & SPIP



Alternatif Pola Sinergi:  
*Joint training*, pemanfaatan hasil audit; konsolidasi risiko; *sharing data*, pengetahuan dan pengalaman audit; penegakan integritas



*“Managing risk is very different from managing strategy. Risk management focuses on the negative threats and failures rather than opportunities and successes”*

**- Robert S. Kaplan**

*“We cannot be mere consumers of good governance, we must be participants, we must be co-creators”*

**- Rohini Nilekani**



BPK RI



TERIMA KASIH

